

Tabel 8.1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Program										
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016								
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10										
Misi 1: "Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing"																					
1.	Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya	1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	1.1.1. Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau	1.1.1.1. Pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada Tahun 2018	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Menurunya angka putus sekolah jenjang dasar	<i>angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs</i>	persen		95	98,4668	100	100								
														SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap	unit	665	667	671	675		
														APK SD/MI	persen	n/a	119,31	119,82	120,34	120,85	
														APK SMP/MTS	persen		94,55	95,58	96,61	97,64	
														Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	Menurunya angka putus sekolah jenjang menengah	angka melanjutkan SMP ke SMA	persen	75	76	80	85
					APK SMA/MA/SMK Sederajat	Persen		67,68	72,42	77,49	82,91										
					1.1.1.2. Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Meningkatnya daya tampung siswa SD, SMP, dan pesantren	Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs	unit	1070	1500	1500	1500								
														1.1.1.2. Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	Meningkatnya daya tampung siswa SMA/SMK/MA	Jumlah ruang kelas baru SMA/SMK/MA	unit	2000	2500	2500
					1.1.1.3. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	Menurunya angka putus sekolah jenjang menengah	<i>Jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa</i>	persen	94,03	95,74	97,45	99,15								
														1.1.1.4. Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	Meningkatnya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	<i>Jumlah penerima beasiswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (pemuda, Keluarga Atlit Berprestasi, Guru, Mahasiswa)</i>	Orang	2.196	2.696	3.196
					1.1.1.5. Peningkatan akses transportasi sekolah di daerah terpencil	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan sekolah di daerah terpencil	APK SD/MI	persen	n/a	96,95	97,98	99								
															APK SMP/MTS	persen		94,03	95,74	97,45	99,15
					1.1.2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas rintisan sekolah standar nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP	1.1.2.1. Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Meningkatnya mutu sekolah berstandar nasional	Jumlah SD berstandar nasional	unit	627	683	739	794							
			Jumlah SMP yang berstandar nasional	unit											312	478	644	809			
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya sekolah terakreditasi											Jumlah Sekolah yang terakreditasi	prosen	N/a	20	22	24	26
			1.1.3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan	1.1.3.1. (1) peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan (2) Peningkatan kualifikasi pendidik minimal S1/D4 (3) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan antara lain berupa pembayaran bantuan 20% premi tunjangan pensiun guru non PNS	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas guru/tenaga kependidikan	jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4	orang	229.658	241.141	253.198	265.858									
													Meningkatnya Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	orang	8.171	12.700	15.900	17.600		
			1.1.4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini	1.1.4.1. Peningkatan pendidikan usia dini di Jawa Barat	Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini	APK pendidikan Anak Usia Dini	persen	48,7	61,85	75	76,75									
													Meningkatnya lembaga pendidikan usia dini	Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini	Unit	12844	14400	17280	20160		
			1.1.5. mengembangkan pendidikan inklusif	1.1.5.1. peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Meningkatnya pendidikan khusus dan pelayanan khusus	Meningkatnya Jumlah SLB Negeri	Unit	38	42	46	50									
													APK SD LB	persen		10,21	10,64	11,14	11,73		
APK SMP LB	persen												10,06	10,44	10,83	11,24					
APK SMA/SMK LB	persen												10,75	10,86	10,96	11,06					
RKB SLB	Unit												28	75	160	203					

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Prognosis		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
							Jumlah pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK)	unit		19	19	19,6	20,2
							Jumlah penyelenggaraan PK dan PLK yang bermutu	unit		1	1	1	1
							Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK	orang		1.507	1.922	2.338	2.753
			1.1.6. Menuntaskan buta Aksara	1.1.6.1. Perwujudan masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara	Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal	Meningkatnya pelayanan pendidikan non formal	AMH	Orang		97.00-97.50	97.50-98.00	98.00-98.50	98.50-99.00
							Meningkatkan kompetensi masyarakat melalui lembaga kursus pendidikan			1800	1940	2080	2220
			1.1.7. Mendukung Perpustakaan di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan berbasis IT	1.1.7.1. Perwujudan masyarakat gemar membaca di Jawa Barat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya penyelenggaraan dan pemberdayaan perpustakaan di Jawa Barat	Tingkat Pembinaan Teknis Kelembagaan Semua Jenis Perpustakaan di Jawa Barat	unit		1000	2000	3000	4000
							Tingkat Pembinaan Teknis Sumber daya Manusia pengelola perpustakaan di Jawa Barat	Orang		1600	3200	4800	6400
							Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat	Judul		83.333	166.667	250.000	33.333
							Meningkatnya Layanan Perpustakaan di Jawa Barat	point		70	75	80	85
							tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKN) masyarakat di Jawa Barat	Orang		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
		1.2. Meningkatnya aksesibilitas kualitas Layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata;	1.2.1. Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	1.2.1.1. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase desa siaga aktif	persen		27,8	32,8	46,8	55,23
							Jumlah persalinaan di tolong oleh tenaga kesehatan	persen		74,34	84,47	81,94	
							Pengelolaan Sanitasi lingkungan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);	Persen		68,8	70	72	74
							Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	persen		25	35	45	55
							Program Promosi Kesehatan						
							meningkatnya kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai Desa/Kelurahan siaga aktif, PHBS di tatanan rumah tangga dan regulasi kawasan tanpa rokok	persen		50	52	55	60
							Menurunnya Prevalensi Gizi buruk	persen		0,75	0,7	0,65	0,6
			1.2.2. Menguatkan Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.2.2.1. penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas bayi, anak, dan masyarakat resiko tinggi untuk gerakan penyelamatan masa depan;	Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif	Persen		40	45	50	60
							Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	persen		2,64	2,64	2,62%	2,60
							Ratio Kematian Ibu (aki)	persen		73	91	90	89
							Jumlah persalinaan di tolong oleh tenaga kesehatan	persen		100	92,50	95	95,50
							Meningkatnya pelayanan komprehensif gangguan mental	Persen		38,10	38,24	38,51	40
							Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular						
							Menurunnya angka penyebaran penyakit TBC dan HIV/AIDS, menurunnya angka penyakit Zoonosis	persen		75	80	85	90

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr			
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10			
						penyakit zoonosis, serta penyakit menular dan tidak menular lainnya.	Angka Kesakitan DBD	100.000		<55	<55	<55	<55	
							Presentase Desa/Kelurahan dengan jumlah desa UCI ≥ 80%	persen		90	92	94	96	
						Setiap kejadian luar biasa (KLB) penyakit dan keracunan tertanggulangi secara cepat dan tepat serta dilaporkan secara cepat kurang dari 24 jam kepada unit pelayanan terdekat	Persentase tertanggulangi KLB dan di laporkan kurang dari 24 Jam	Persen		100	100	100	100	
							Angka Kematian Diare pada KLB	persen		< 1	< 1	< 1	< 1	
						Meningkatkan surveilans system kewaspadaan dini (SKD) dalam rangka reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang berorientasi pada penguatan system, kepatuhan terhadap standar an peningkatan komitmen	Persentase Puskesmas melaksanakan Surveilens sistem kewaspadaan dini (SKD)	persen		80	82	85	87	
						Meningkatkan dalam pengendalian, penemuan dan tatalaksana penyakit TBC, HIV/AIDS, menurunnya angka penyakit Zoonosis, serta penyakit menular dan tidak menular lainnya.	Angka Kesembuhan Penyakit TB Paru	persen		86	86	86	87	
					Program Pelayanan Kesehatan	terciptanya sistem pembiayaan kesehatan masyarakat	Persentase RS Pemerintah terakreditasi	persen		90	90	95	100	
						meningkatkan kualitas Rumah Sakit Provinsi menjadi tersedianya kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi.	Persentase RS Swasta terakreditasi	persen		70	75	80	85	
							Persentase Puskesmas terakreditasi	persen		25	30	35	40	
		1.2.3	Menguatkan pembiayaan, Sumber daya kesehatan	1.2.3.1.	Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	meningkatkan kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar	Persen		50	55	60	65
							Persentase Rumah Sakit dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar	Persen		20	35	45	55	
							Jumlah Rumah sakit Rujukan Regional	Jumlah		1	2	3	4	
							Jumlah RSUD mampu PONEK			80	80	85	90	
							Persentase Pemanfaatan Puskesmas PONEK	persen		50	60	70	80	
		1.2.4.	Meningkatkan Manajemen, regulasi , teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan	1.2.4.1.	Penguatan Managemen, regulasi, system infomasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan	Program Manajemen Kesehatan	Terwujudnya kualifikasi UPTD Provinsi menjadi center of excellent.	Persentase Rumah sakit pemerintah menjadi BLUD	persen		40	45	50	55
							Terwujudnya system informasi kesehatan terintegrasi dan penelitian pengembangan kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan	Peningkatan Kapasitas BLK sebagai CEO Pelayanan Penunjang Diagnostik dan kesehatan masyarakat	persen		21	84	91	92
							Tersedianya Dokumen Regulasi dan pendukung Sistem Kesehatan	Jumlah		1	2	3	4	
							tersedianya data dan informasi kesehatan yang komprehensif	persen		60	60	63	70	
		1.2.5.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peserta KB	1.2.5.1.	Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Program Pelayanan KB	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program keluarga berencana	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	persen		63,90	64,6	65,2	65,8
							meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan)	penurunan Total Fertility Rate (TFR) melalui PUP, penundaan anak pertama dan motivator PUP	persen		49	49,5	50,1	50,6

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
						meningkatnya ketahanan keluarga peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan KS 1 serta Pengembangan Bina Keluarga	Jumlah kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang punya usaha	kelompok		100	150	200	275
							Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita	kelompok		1.250	1.277	1.304	1.331
						menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Jumlah peserta KB aktif	persen		1,89	1,88	1,87	1,86
					Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan)	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)	persen		19,55	19,8	20,15	20,5
							Jumlah Kelompok Generasi Berencana	kelompok		104	158	185	212
			1.2.6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	1.2.6.1. Penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)	Program Pengembangan Perumahan	Lihat bab 8 Bidang Perumahan	Cakupan rumah layak huni mencapai 100.000 unit	persen		10	20	40	60
		1.3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK	1.3.1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1.3.1.1. Peningkatan daya saing tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja Jawa Barat	Perwujudan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan	Orang		2778	2850	3180	3270
							Jumlah lembaga Pelatihan kerja swasta dan pemerintah yang di akreditasi	unit		33	40	45	50
						sertifikasi dan standarisasi bagi pekerja	Persentase tenaga kerja yang siap bekerja dan tersertifikasi	Orang		350	520	540	560
			1.3.2. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja	1.3.2.1. Perlindungan, pengawasan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan ketenaga kerjaan	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	persen		50	55	60	65
							Jumlah Perusahaan yang terbina dan terperiksa	Perusahaan		480	480	480	480
			1.3.3. Perluasan lapangan kerja	1.3.3.1. Peningkatan penempatan tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Membuka 2 (dua) juta lapangan kerja baru	Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder. Dan tertier	Orang		200.000	450.000	480.000	483.000
							Jumlah Lapangan kerja bagi masyarakat disabilitas	Orang		40	60	60	60
				1.3.3.2. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus	Jumlah lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus	buah		500	600	850	
			1.3.4. Menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi	1.3.4.1. Kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi	Program Pengembangan Transmigrasi	Meningkatnya wilayah/kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi	Kawasan		11	6	8	9
						Meningkatnya kerjasama ketransmigrasian	Jumlah tindak lanjut kerjasama antar provinsi dibidang ketransmigrasian	MOU		11	6	8	9
				1.3.4.2. Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement) dan warga sekitar	Program Pengembangan Transmigrasi	Meningkatnya kemandirian masyarakat translok	Jumlah calon transmigran, masyarakat kawasan transmigrasi lokal (Resettlement) dan	orang		270	860	960	970
Misi 2: "Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan"													
2.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	2.1. Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur	2.1.1. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	2.1.1.1. Mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan	Program Perberdayaan Sumber Daya Pertanian	Meningkatnya lahan pertanian	Jumlah luas lahan sawah baru	Ha		400	5.000	20.000	45.000
		2.2. Meningkatnya daya saing usaha Pertanian	2.2.1. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian perkebunan, dan peternakan	2.2.1.1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, dan peternakan;	Jumlah Produksi Padi	persen		11.271.860 ton	3,00	3,00	3,00
							Jumlah Produksi Jagung	persen		1.028.652 ton	5,00	5,00	5,00
							Jumlah Produksi Kedelai	persen		47.425 ton	3,00	3,00	3,00
							Jumlah Produksi Kacang Tanah	persen		76.575 ton	2,00	2,00	2,00
							Jumlah Produksi Kacang Hijau	persen		10.199 ton	2,00	2,00	2,00
							Jumlah Produksi Ubi Kayu	persen		2.131.123 ton	2,00	2,00	2,00
							Jumlah Produksi Ubi Jalar	persen		436.577 ton	2,00	2,00	2,00

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
							Jumlah produksi Sayuran	persen		3.722.838 ton	2,00	2,00	2,00
							Jumlah Produksi Buah2han	persen		2.528.974 ton	4,00	4,00	4,00
							Jumlah Produksi Tan. Obat	persen		87.364 ton	2,00	2,00	2,00
							Jumlah Produksi Tanaman Hias	persen		264.019.760 tangkai	2,00	2,00	2,00
							Tingkat produksi dan produktivitas komoditas perkebunan	persen		> 2	> 2	> 2	> 2
							Meningkatnya Produksi Peternakan :						
							a. Jumlah Produksi Daging	Ton/Ha		693.019	731.474	760.011	789.663
							b. Jumlah Produksi Telur	Ton/Ha		194.953	199.620	204.305	209.100
							c. Jumlah Produksi Susu	Ton/Ha		219.278	241.391	258.357	265.811
			2.2.1.2.	Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan	Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat	Jumlah Peserta Pelatihan bagi petugas, penyuluh dan petani	orang/tahun		500	500	500	500
							Kemantapan Kelembagaan Perkebunan	persen		57,50	60,00	62,50	65,00
							Proporsi luas lahan eksisting perkebunan	Persen		13,00	13,00	13,00	13,00
							Jumlah Peserta Pelatihan bidang peternakan	orang/tahun		5.738	500	500	500
							Meningkatnya infrastruktur pertanian:						
							a. Jitrit	ha		14.318	1.000	1.250	1.250
							b. Jides	ha		12.586	1.000	1.250	1.250
							Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis						
							Kemantapan Kelembagaan Perkebunan	persen		20,00	25,00	30,00	35,00
							Proporsi potensi lahan eksisting perkebunan	persen		13,00	13,00	13,00	13,00
			2.2.1.3.	Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan	Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama (ha)	ha		117.375	116.201	115.039	113.889
							Intensitas serangan OPT tanaman perkebunan	persen		< 10,00	< 9,75	< 9,50	< 9,25
							Jumlah Kasus Penyakit Hewan :						
							- Anthrax	kasus/tahun		0	0	0	0
							- Avian Influenza	kasus/tahun		75	65	60	55
							- Brucellosis	prevalensi		< 3,7%	< 3,3%	< 2,9%	< 2,5%
							- Rabies	kasus/tahun		1	0	0	0
							Intensitas serangan OPT Perkebunan	persen		<10	>9,75	>9,25	>9,25
			2.2.1.4.	Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Meningkatnya sarana dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kebutuhan	Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi	persen		11,50	11,30	11,10	10,90
							Jumlah Kelompok penerapan sistem jaminan mutu	kelompok		26 Kab/Kota	20 pelaku (10 Kab/Kota)	20 pelaku (10 Kab/Kota)	20 pelaku (10 Kab/Kota)
							Meningkatnya nilai tambah pengolahan dan margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan,						
							a. Padi	persen		20,00	24,00	28,00	32,00

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progn		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
						peternakan, perikanan dan kehutanan	b. Palawija	persen		20,00	22,80	25,60	29,40
							c. Sayuran	persen		20,00	23,00	26,00	29,00
							Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu	pelaku usaha		16	5	5	5
							Tingkat nilai tambah produk perkebunan	persen		> 2,00	> 2,00	> 2,00	> 2,00
							Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Peternakan	pelaku/tahun		4	4	4	4
													Type equation here.
			2.2.2. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai Selatan (GAPURA)	2.2.2.1. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum	Produksi perikanan	persen		5,00	5,00	5,00	5,00
				2.2.2.2. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	Meningkatnya jumlah kawasan industri pengolahan hasil perikanan, serta meningkatnya ketersediaan aneka	Jumlah sentra industri pengolahan hasil perikanan	lokasi		5	6	7	8
							Jumlah aneka produk olahan hasil perikanan	jenis		18	21	25	28
							Persentase nilai tambah usaha perikanan di Pantura melalui Gapura	persen		6,60	8,40	10,08	12,09
							Persentase nilai tambah usaha perikanan di Pansela melalui Gapura	persen		4,50	5,50	6,05	6,65
							Tingkat Nilai tambah produk perkebunan	persen		> 2	> 2	> 2	> 2
			2.2.3. Meningkatkan produktifitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan	2.2.3.1. Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan;	Meningkatnya produksi kayu	persen			10,00	10,00	10,00
							Unit hutan rakyat bersertifikasi	unit		1,00	1,00	1,00	1,00
							Jumlah Hutan rakyat bersertifikat lestari	unit		1	1	1	1
							Jumlah indutri kehutanan yang tertib perijinannya	unit		158	5	5	5
							Jumlah industri primer kehutanan	unit		9	2	2	2
							Peningkatan produksi kayu olahan	persen		1.186.018 m3	10,00	10,00	10,00
							Tertib penatausahaan hasil hutan	Kab/Kota		26	27	27	27
							Jumlah kelompok pelaku aneka usaha kehutanan	kelompok		269	30	30	30
							Peningkatan penerimaan retribusi Tahura Ir. H. Djuanda	persen		Rp. 1,6 Milyar	10,00	10,00	10,00
							Peningkatan produksi aneka usaha kehutanan	persen		5.000 ton	10,00	10,00	10,00
							Jumlah obyek wisata alam hutan yang produktif	lokasi		61	2	2	2
							Jumlah kelompok kerja penunjang imbal jasa lingkungan	kelompok		5	2	2	2
							Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan	persen		100,00	100,00	100,00	100,00
		2.3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	2.3.1. Meningkatkan investasi	2.3.1.1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya kepastian dan ketepatan pelayanan perizinan	Presentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan	persen		100,00	100,00	100,00	100,00
							Presentase ketepatan waktu pelayanan perizinan	persen		97,00	97,00	97,00	97,00
							Jumlah perusahaan (PMA/PMDN) yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	perusahaan		700	750	800	900
							Persentase penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN	persen		20,00	22,00	22,00	23,00

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
						Meningkatnya peluang investasi di Jawa Barat	Jumlah profil peluang investasi di Jawa Barat yang layak ditawarkan kepada investor	dokumen		1	1	1	1
							Jumlah promotion business center yang representatif	unit		1	1	1	1
							Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk)	event		14	16	20	24
							Persentase peserta business meeting/event promosi BKPPMD	persen		20,00	20,00	20,00	25,00
							Jumlah kerjasama investasi Government to Government, Private to Government, Private to Private	dokumen MOU		1	1	1	1
						Meningkatnya jumlah investor ke Jawa Barat	Nilai investasi di Jawa Barat	Triyuan rupiah		76,72	85,55	95,81	107,79
			2.4.3. Peningkatan produktivitas BUMD dan Lembaga Keuangan lainnya	2.4.3.1. Meningkatkan peran, kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan	Meningkatnya kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun	Kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun	Milyar rupiah		210	237	244	251
						Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan	Jumlah Penyaluran Kredit PD.BPR dan PD.PK	Milyar rupiah		200,00	308,10	400,50	520,60
		2.4. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas wirausahawan	2.4.1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	2.4.1.1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya KUMKM Berdaya Saing	KUMKM Berdaya Saing	unit KUMKM		200	200	200	200
						Meningkatnya tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	unit koperasi		1.500	1.000	1.000	1.000
						Meningkatnya pemasaran dan Pengembangan Jaringan KUMKM	Pemasaran dan Pengembangan Jaringan KUMKM	unit KUMKM		437	500	500	500
						Meningkatnya jumlah Koperasi Skala Besar	Peningkatan Koperasi menjadi Koperasi Skala Besar	unit koperasi					4
						Meningkatnya jumlah Koperasi Percontohan Jawa Barat	Koperasi Percontohan Jawa Barat	unit koperasi					52
				2.4.1.2. Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Menciptakan Wirausaha Baru	Penciptaan Wirausaha Baru	orang		-	4.000	4.000	4.000
						Meningkatnya kapasitas SDM KUMKM	Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM	unit KUMKM		1.345	2.000	2.000	2.000
						Meningkatnya akses Teknologi Tepat Guna bagi KUMKM	Akses Teknologi Tepat Guna bagi KUMKM	unit KUMKM				100	150
						Meningkatnya akses Pembiayaan bagi KUMKM melalui KCR	Akses Pembiayaan bagi KUMKM melalui KCR	unit KUMKM		4.500	4.750	5.250	5.500
						Meningkatnya fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	unit KUMKM		2.500	3.050	3.550	4.100
						Meningkatnya pendirian Paviliun/gerai KUMKM Jabar	Pendirian Paviliun/Gerai KUMKM Jabar	Unit		5	4	4	4
			2.4.2. Meningkatkan daya saing industri	2.4.2.1. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah (IKM)	Jumlah unit usaha industri kecil menengah	unit		245.234	255.225	258.275	260.215
							Jumlah unit wirausaha Usaha Kecil Menengah	unit		545	2.623	4.623	6.623
							Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah	orang		2.452.337	2.490.337	2.520.327	2.555.325
				2.4.2.2. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki).	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Berkembangnya industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki) dan industri potensial lainnya	Jumlah Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Industri	unit usaha		2.108	2.308	2.508	2.708
							Pemahaman Industri Ramah Lingkungan	persen		75,00	80,00	82,50	85,00
		2.5. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional	2.5.1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan	2.5.1.1. Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan panganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah	Jumlah cadangan pangan pemerintah	Ton		400	400	400	400

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Prognosis		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
				pangan		Meningkatnya ketersediaan informasi, harga dan akses pangan	Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan	persen		66,70	100,00	100,00	100,00
						Menurunnya Konsumsi Beras perkapita	Konsumsi Beras perkapita	kg/kapita/tahun		94,00	90,00	88,00	85,00
						Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen		80,00	85,00	90,00	90,00
						Meningkatnya Penanganan Daerah rawan pangan	Menurunnya Desa Rawan Pangan	desa		813,00	613,00	413,00	213,00
		2.5.2. Memperluas kesempatan kerja	2.5.2.1. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Memperluas kesempatan kerja	Padat Karya	orang		54.400	6.200	6.450	6.700
						Mencetak 100.000 wirausahaan baru di Jawa Barat;	Jumlah wirausaha baru	Orang			20.000	20.000	20.000
		2.5.3. Meningkatkan ekonomi perdesaan	2.5.3.1. Dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur		Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kondisi jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur	Persen		60,00	63,00	68,00	70,00
			2.5.3.2. Dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya kondisi jaringan irigasi pada daerah irigasi sentra pertanian lahan sawah	Persen		40,00	45,00	50,00	55,00
		2.5.4. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	2.5.4.1. Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya daya saing dan perluasan pasar ekspor produk Jawa Barat	Volume ekspor Jawa Barat per tahun Nilai ekspor Jawa Barat per tahun	juta ton Milyar US\$		13,00 25,70	13,00 25,70	14,00 27,70	14,50 28,00
			2.5.4.2. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan termasuk Revitalisasi Pasar Tradisional	Persentase aktivitas fasilitasi penggunaan produk dalam negeri Jumlah sarana perdagangan	persen unit		75,00 3.101	77,00 3.101	79,00 3.101	81,00 3.177
			2.5.4.3. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	Tingkat fasilitasi advokasi perlindungan konsumen per tahun Tingkat pengawasan barang beredar per tahun Jumlah peneraan UTTP Jumlah pengujian BDKT per tahun	kali kali buah buah		8 15 5.678.145 1.250	10 30 6.577.980 3.348	12 33 6.740.601 3.624	14 36 6.831.222 3.900
		2.5.5. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat	2.5.5.1. Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali		Program Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata	Jumlah Event Pariwisata	event/tahun		2	2	2	2
							Peningkatan produk wisata	Jumlah penyusunan bahan kebijakan kepariwisataan pertahun		3	3	3	3
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	ODTW pertahun		-	1	1	1
							Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Jenis Pelatihan pertahun orang pertahun		- -	5 150	5 250	5 250
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke objek wisata di Jawa Barat	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target optimis) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target moderat)	orang orang		700.000 700.000	810.000 770.000	950.000 850.000	1.100.000 950.000
		2.5.6. Mengukatkan ekonomi regional	2.5.6.1. Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya		Program Penataan ruang	Terwujudnya pengembangan tiga Metropolitan Jawa Barat	Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga Metropolitan	persen		50,00	80,00	100,00	100,00
			2.5.6.2. Pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya		Program Penataan ruang	Terwujudnya pengembangan tiga pusat pertumbuhan di Jawa Barat	Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga pusat pertumbuhan	persen		50,00	80,00	100,00	100,00

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr			
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10			
				2.5.6.3.	Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Tertindaknya pengembangan angkutan massal	Tingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya	persen		45,00	56,00	67,00	78,00

Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik

3.	Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	3.1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik	3.1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	3.1.1.1. Penataan struktur organisasi yang proporsional	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;	Meningkatnya kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja	Prosentase Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yg tepat ukur dan tepat fungsi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
						Meningkatnya jumlah unit pelayanan publik yang bersertifikat ISO	Prosentase Unit Pelayanan Publik yang berstandar ISO	Persen	28%		40%	45%	45%	
						Meningkatnya perolehan nilai hasil evaluasi penerapan SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP pada OPD/Biro	angka	58.52		60,10	60,50	62,20	
				3.1.1.2.	Peningkatan pelayanan administrasi organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
				3.1.1.3.	Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;	Terwujudnya penegasan batas daerah dan kode wilayah	Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah	buah	22	32	39	46	53
				3.1.1.4.	Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;	Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh lingkaran pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan		B	B	A	A
				3.1.1.5.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan zona integritas	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;	terwujudnya kinerja pelayanan pemerintah sesuai harapan masyarakat	Jumlah OPD yang menerapkan zona integritas	OPD/BALAI/KCP/UPTD	-	-	2 OPD/BALAI/KCP/UPTD	4 OPD/BALAI/KCP/UPTD	6 OPD/BALAI/KCP/UPTD
				3.1.1.6.	Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pengembangan Kearsipan	Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip	Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan	Persen		10%	30%	50%	70%
						Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik	Tingkat ketersediaan pusat arsip OPD	Persen		50%	60%	70%	80%	
						Meningkatnya keamanan arsip pemda	Tingkat pengamanan arsip vital/arsip aset pemda	Persen		10%	30%	50%	70%	

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
				3.1.1.7. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah	Jumlah Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	buah		N/A	3	3	3
				3.1.1.8. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD	Persen		100%	100%	100%	100%
						Tersedianya dokumen operasional	Tingkat ketersediaan dokumen operasional	Persen		100%	100%	100%	100%
						Pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat dan berbasis IT	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	Persen		100%	100%	100%	100%
						Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan	Persen		100%	100%	100%	100%
				3.1.1.9. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	penggunaan anggaran yang akuntabel	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	Persen		100%	100%	100%	100%
				3.1.1.10. Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Peningkatan PAD	Tingkat Pendapatan Daerah:						
						a. PAD		Persen		59,35%	83,38%	84,61%	84,35%
						b. Dana Perimbangan		Persen		15,51%	16,48%	15,27%	15,52%
						c. Sumber lainnya yang sah		Persen		25,14%	0,14%	0,12%	0,13%
						Efektivitas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau	Efektivitas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau	Persen	75%	75%	75%	80%	85%
				3.1.1.11. Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan	Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah Pemprov	Persen	N/A	N/A	25	35	45
				3.1.1.12. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi	Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi	Persen		85%	90%	90%	95%

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
						Sinergi kewilayahan dan lintas daerah	Prosentase penyelesaian permasalahan yang dikoordinasikan	Persen	N/A	N/A	50%	60%	70%
				3.1.1.13. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sinergi perencanaan provinsi dengan pusat dan kab/kota	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota	Persen dari Jumlah Dokumen Perencanaan		70%	75%	75%	80%
							Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan	Persen dari Keterlibatan/keikutsertaan stakeholder pembangunan dalam proses perencanaan		80%	85%	90%	95%
				3.1.1.14. Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian, Studi dan Survei	Meningkatnya kualitas penelitian dan riset daerah	Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen dari rekomendasi penelitian dan riset perencanaan daerah		5%	10%	15%	25%
				3.1.1.15. Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dukungan basis data yang akurat, terukur dan terintegrasi	Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah	Persen			50%	70%	80%
				3.1.1.16. Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kabupaten dan kota	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah.	Persen		70%	70%	75%	80%
						Teramankanya aset Pemerintah Provinsi	Persentase aset yang diamankan	Persen			65%	67%	69%
						Meningkatnya data aset yang terinventarisir	Prosentase aset yang sudah terinventarisir	Persen			80%	85%	90%
				3.1.1.15. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan	Meningkatnya jumlah OPD yang menerapkan SPIP	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP	OPD			56	56	56
				3.1.1.16. Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern	Prosentase pemanfaatan dan tindak lanjut pengawasan intern	Persen			80%	85%	90%
				Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Prosentase akurasi data kependudukan	Persen	N/A	N/A	70%	76%	82%

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
			3.1.2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;	3.1.2.1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparat sesuai standar daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparat sesuai standar daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD	Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpelihara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
			3.1.3. Meningkatkan kerjasama pembangunan	3.1.3.1. Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/ kota	Program Kerjasama Pembangunan	terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri	Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri	dokumen kerjasama		AD = 5, AP =10 dan LN =2	AD = 6, AP =10 dan LN =3	AD = 8, AP =11 dan LN =4	AD = 10, AP =11 dan LN =5
				3.1.3.2. Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri	Program Kerjasama Pembangunan	kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri	dokumen kerjasama		PT=3, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan LSM=2	PT=3, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan LSM=3	PT=4, BUMD/BUMN=3, Swasta=3 dan LSM=4	PT=5, BUMD/BUMN=3, Swasta=4 dan LSM=5
			3.1.4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat	3.1.4.1. Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa	Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa	Persen		50%	60%	70%	75%
				3.1.4.2. Peningkatan pembinaan bagi aparat desa dan kelurahan	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	meningkatkan kualitas sumber daya aparat desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan berprestasi terhadap total desa dan kelurahan	Persen		40%	45%	50%	55%
						Meningkatnya perkembangan desa	Tingkat perkembangan desa	Persen		40%	45%	50%	55%
				3.1.4.3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan perdesaan	Tingkat Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan	Persen		50%	55%	60%	65%
						Meningkatnya strata Posyandu multifungsi	Meningkatnya strata Posyandu multifungsi	posyandu		5.000	15.000	25.000	35.000
				3.1.4.4. Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	membangun infrastruktur desa dan perdesaan	Tingkat ketersediaan Infrastruktur Perdesaan	Persen		50%	55%	60%	65%
4.	Terwujudnya pemerintahan yang modern	4.1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK	4.1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	4.1.1.1. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persen		100%	100%	100%	100%
				4.1.1.4. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder pembangunan	Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah	persen dari jumlah layanan informasi		70	80	90	95
						Meningkatnya indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Persen		2,50%	2,55%	2,60%	2,65%
						Meningkatnya jumlah penduduk melek TIK	Jumlah penduduk melek TIK	orang		11.400.000	12.540.000	13.794.000	15.173.400
						Meningkatnya Konten website Pemerintahan Provinsi mengenai kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara lengkap	Layanan melalui situs website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	pengunjung		100.000 pengunjung	110.000 pengunjung	120.000 pengunjung	130.000 pengunjung
						Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi	Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo	koneksi		85 koneksi	90 koneksi	95 koneksi	100 koneksi

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
						Meningkatnya jumlah perijinan lembaga penyiaran	Rasio perijinan lembaga penyiaran	Persen		62,93% Jumlah Izin penyelenggaraan	67,59%	72,26%	76,92%
						Meningkatnya mutu isi siaran lembaga penyiaran	Status mutu isi siaran lembaga penyiaran	Persen		13,30% Pelanggaran isi siaran	12% Pelanggaran isi siaran	10,35% Pelanggaran isi siaran	8,48% Pelanggaran isi siaran
						Meningkatnya kualitas SDM penyiaran	Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran	orang		1.670 Orang SDM Penyiaran	300 Orang	300 Orang	300 Orang
						Meningkatnya jumlah masyarakat yang melek media data	Jumlah masyarakat peserta sosialisasi melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media	orang		1.800 Orang	1.800 Orang	3.600 Orang	7.200 Orang
5.	Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten	5.1. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur	5.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah	5.1.1.1. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi	Program Pengembangan kompetensi Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat	Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75%	Persen		N/A	75%	80%	85%
						Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat	Prosentase pegawai yang memiliki min. 1 sertifikat kompetensi	Persen		N/A	30%	35%	40%
				5.1.1.2. Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Persen		N/A	50%	55%	60%
6.	Meningkatkan stabilitas di daerah	6.1. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	6.1.1. Menata sistem hukum di daerah	6.1.1.1. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	terwujudnya Raperda yang diagendakan dalam prolegda	Jumlah Raperda yang diagendakan dalam prolegda	raperda		29	44	59	74
				6.1.1.2. Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	harmonisasi produk hukum Provinsi dan produk hukum Kabupaten/Kota	Harmonisas produk hukum Provinsi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota	perda		360	400	415	415
				6.1.1.3. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	terselesainya perkara/sengketa perdata, pidana, TUN dan HAM secara Litigasi dan Non Litigasi dan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan HAM	Jumlah penyelesaian perkara/sengketa perdata, pidana, TUN dan HAM secara Litigasi dan Non Litigasi	perkara		25	64	103	142
			6.1.2. Meningkatkan budaya taat hukum	6.1.2.1. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	Meningkatnya pemahaman peraturan perundangan dan HAM	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan			30	31	32	33
			6.1.3. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	6.1.3.1. Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya penegakan perda dan peraturan perundangannya	Jumlah penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya	perda	9	8	10	12	14

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
						Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	kali	1.023	1.033	1.137	1.012	961
						Menurunnya jumlah unjuk rasa	Jumlah unjuk rasa ke tingkat Provinsi	kali	72	73	80	71	68
						Meningkatnya jumlah anggota Linmas	Jumlah anggota Linmas per 100 penduduk	orang	145.200	145.200	472.411	479.970	487.649
			6.1.3.2.	Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya jumlah Pol PP	Jumlah anggota Pol PP per 10.000 penduduk	orang	4.650	4.650	4.724	4.800	4.876
						Meningkatnya jumlah PPNS untuk penegakkan perda sektoral provinsi	Jumlah PPNS provinsi	orang	189	189	189	208	229
		6.1.4.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga	6.1.4.1.	Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik;	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi	Jumlah penyelenggaraan fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politik	kali		2	2	2
				6.1.4.2.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik	Persen		50%	52%	54%
				6.1.4.3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	87%	89%	91%	93%
				6.1.4.4.	Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Jumlah PERDA yang disetujui	perda		12	13	15
								Jumlah PERDA inisiatif	perda		8	8	9
								Jumlah rapat kerja inisiatif dewan	kali		150	150	155
		6.1.5.	Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara	6.1.5.1.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBN	Persen		60%	65%	70%

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10		
Misi 4: "Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan"													
7.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.	7.1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana	7.1.1. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	7.1.1.1. Peningkatan kinerja perencanaan ruang	Program Penataan Ruang	Mewujudkan ketersediaan pranata rencana umum dan rencana rinci penataan ruang	Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (Dokumen RDTR Kab./Kota)	persen	N/A	10	50	80	100
				7.1.1.2.	Program Penataan Ruang	Mewujudkan ketersediaan pranata rencana umum dan rencana rinci penataan ruang	Tingkat Penanganan Raperda KSP (Kaw. Strategis Provinsi)	persen	N/A	47	59	71	82
				7.1.1.3. Peningkatan kinerja pemanfaatan ruang	Program Penataan Ruang	Meningkatnya jumlah dan luas area kawasan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan minimal 20% untuk RTH Publik	Tingkat penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan (min 20%)	persen	N/A	10	11,8	13,7	15,5
		7.1.2. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana	7.1.2.1. Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	a) Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya; b) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri dan rumah sakit; c) Meningkatnya adaptasi dan sinkronisasi kebijakan tata kelola lingkungan; d) Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. e) Penerapan teknologi bersih industri	Pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang	persen	9,6	9,6-10,4	10,4-10,8	10,8-11,2	11,2-11,7	
													7.1.2.2. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr			
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10			
			7.1.3. Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung	7.1.3.1. Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan	Program Pengelolaan Kawasan Lindung	a) Tervujudnya peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung 45%; b) Terlaksananya koordinasi dalam mewujudkan pencapaian kawasan lindung 45%; c) Meningkatnya upaya pengelolaan lahan budidaya masyarakat untuk menunjang fungsi lindung; d) Tersusunnya pranata dan indikator pengelolaan kawasan lindung; e) Terlaksananya tata kelola dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan negara; f) Terlaksananya sinkronisasi kebijakan kawasan lindung nasional, provinsi dan kabupaten/kota.	Capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah	persen	N/A	36-37	37-38	38-39	39-41	
			7.1.4. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup	7.1.4.1. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	a) Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis, termasuk di kawasan DAS prioritas; b) Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan di kawasan hutan negara; c) Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan di kawasan perkebunan; d) Meningkatnya upaya perlindungan keanekaragaman hayati (kehati); e) Meningkatnya upaya konservasi kawasan hutan negara dan kawasan sekitar mata air; f) Meningkatnya peran lintas pelaku dalam penanganan gangguan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan; g) Meningkatnya pengembangan	Tingkat rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara	persen	N/A	16	17	34	52	
				7.1.4.2. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut	Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan mangrove, kawasan pesisir dan laut;	Tingkat rehabilitasi mangrove (rusak 15.000 Ha kemampuan rehabilitasi 1.000 Ha/thn)	persen	N/A	10	6	20	40	60
			7.1.5. Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah	7.1.5.1. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan	Tingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Jenis	N/A	4 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel)	4 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel)	5 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel, Angin)	5 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel, Angin)	
				7.1.5.2. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi	Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas	meningkatnya pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik berupa eksplorasi potensi energi panas bumi di Jawa Barat	Tingkat eksplorasi potensi panas bumi	persen		20		30	40	50
				7.1.5.3. Peningkatan upaya pengembangan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah	Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Meningkatnya pemutakhiran kondisi Cekungan Air Tanah	Tingkat pemutakhiran kondisi CAT (Cekungan Air Tanah)	persen		20		30	35	40
			7.1.6. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	7.1.6.1. Penanggulangan korban bencana	Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;		Prosentase eks korban bencana yang mendapat bantuan bahan bangunan rumah			100	100	100	100	

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
							Jumlah anggaran persediaan bantuan tanggap darurat bencana	Milyar (Rp)		5	6	7	8
							Jumlah pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Kali		3	4	4	4
							Jumlah masyarakat terlatih dan paham bencana	Orang		70	100	120	50
							Kab/Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban skala Provinsi	persen		100	100	100	100
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar;	8.1. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	8.1.1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	8.1.1.1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	meningkatkan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan	Tingkat Kemantapan jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)	persen	97,05	97,0 - 97,5	97,5-97,7	97,7-97,9	97,9-98,0
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan	persen		64-65	65-66	66-67	67-68
					Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	a) Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan (IRMS) dan Sistem Manajemen Jembatan (BMS) serta penentuan peran dan status jalan di Jawa Barat; b) Tersedianya data Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruas-ruas jalan provinsi sebagai bahan informasi basis data jalan dan jembatan	Tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan	persen	95	95 - 96	96 - 97	97 - 98	98 - 99
			8.1.2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;	8.1.2.1. Peningkatan konservasi sumber daya air	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;	meningkatkan kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industri	Penanganan sumber air berupa, situ/waduk, mata air dan sungai	persen	N/A	110 situ/waduk - 65 titik sungai	140 situ/waduk 30 mata air 112 titik sungai	170 situ/waduk 60 mata air 159 titik sungai	200 situ/waduk 90 mata air 206 titik sungai
				8.1.2.2. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	tersedianya jaringan irigasi yang handal melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi	persen	64,52	64-66	66-71	71-76	76-81

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
				8.1.2.3. Pengendalian daya rusak air	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai	tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai	Tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam	persen		100	100	100	100
		8.1.3. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	8.1.3.1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal melalui pengembangan sistem instalasi pengolahan air minum di tingkat perkotaan, kawasan perdesaan (Ibu Kota Kecamatan / IKK dan kawasan khusus / wisata) dan lingkungan (masyarakat berpenghasilan rendah)	Cakupan layanan air minum	persen	51,76	54-58	58-63	63-70	70-73	
			8.1.3.2. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL	Cakupan pelayanan air limbah domestik	persen	64,00	63-63,5	63,5-64	64-65	65-67	
			8.1.3.3. Peningkatan-cakupan layanan persampahan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah	Cakupan layanan persampahan perkotaan	persen	63,53	63-64	64-65	65-67	67-69	
			8.1.3.4. Pengembangan lingkungan permukiman sehat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman khususnya di desa rawan sanitasi	Persentase kawasan kumuh	persen	N/A	3,9 - 3,81	3,81-3,79	3,79-3,77	3,77-3,75	
						revitalisasi dan optimalisasi sistem drainase perkotaan serta pembangunan drainase skala metropolitan	Tingkat kinerja drainase permukiman (menurunkan jml kawasan dgn genangan > 30 cm selama 2 jam	persen	N/A	100 (60Ha)	97 - 95%	95 - 90%	90-88%
		8.1.4. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	8.1.4.1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi	Tingkat sertifikasi SDM jasa konstruksi	persen	N/A	25 - 27%	27 - 29%	29-31%	31-33%	
		8.1.5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	8.1.5.1. peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)	Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman	tersedianya rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)	Cakupan rumah layak huni	persen	N/A	91,50-92,12	92,12-92,71	92,71-93,30	93,30-93,89	
						Persentase-kawasan-kumuh	persen	N/A					
		1.2.6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	1.2.6.1. Penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)	Program Pengembangan Perumahan	Lihat bab 8 Bidang Perumahan	Cakupan rumah layak huni mencapai 100.000 unit	persen		10	20	40	60	

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	a. Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman; b. Mengembangkan terminal angkutan umum regional yang terpadu dan modern; c. Meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum; d. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum; e. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang; f. Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jawa Barat, melalui pengembangan terminal angkutan umum regional yang	Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi	<i>persen</i>	100	100	100	100	100
					Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan lebih (overloading)	Tingkat Penindakan Pelanggaran <i>Overloading</i> di Jembatan Timbang	<i>persen</i>	100	100	100	100	100
						Jumlah pelanggaran di jembatan timbang	<i>unit</i>	249.208	211.827	180.053	153.045	130.088	
					Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	a. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri; b. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.	Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor	<i>persen</i>	N/A	40,0-47,5	47,5-57,5	57,5-67,5	67,5-77,5
			8.1.7. Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan	8.1.7.1. Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi	Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah	Rasio elektrifikasi rumah	<i>persen</i>	73,55	73-75	75-77	77-78	78-79
		8.3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis	8.3.1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	8.3.1.1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	a) Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan meliputi: pembangunan dan peningkatan jalan horizontal dan vertikal di Jawa Barat bagian Selatan antara lain jalan poros timur di jalur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon, jalan vertikal Palabuhanratu – Cikidang – Cibadak – Bogor – Depok – Jakarta, jalan horizontal di Jawa Barat bagian Selatan, jalan horisontal Tengah Selatan-Selatan Jawa Barat Selatan (Kiara Dua-Baros/Cibuni-Cigadog-Balegede-Pangalengan (Pintu) - Sumadra-Cikajang-Pamegatan-Cibalong-Cikohkol); jalan Poros Timur Puncak-Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu, jalan Sentul-	Tingkat Aksesibilitas Jalan	<i>km/km2</i>	0,98119	0,98258	0,98750	0,98923	

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
			8.3.2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumberdaya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;	8.3.2.1. Pembangunan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;	Penuntasan pembangunan Waduk Jatigede, pembangunan Waduk Cipanas, Waduk Cipasang, Waduk Kadumanik dan Waduk Cipanas Saat di Kabupaten Sumedang; Waduk Ciawi, Waduk Narogong, Waduk Genteng, Waduk Sodong, Waduk Tanjung, Waduk Parung Badak, Waduk Cijurai dan Waduk Cidurian di Kabupaten Bogor; Waduk Limo di Kota Depok; Waduk Matenggeng, Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis; Waduk Citepus dan Waduk Cileutuh di Kabupaten Sukabumi; Waduk Cibuni di Kabupaten Cianjur; Waduk Sukawana	Pembangunan Waduk Strategis	Waduk	N/A	1	2	2	3
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	terbangunnya Daerah Irigasi Caringin Kabupaten Sukabumi; Daerah Irigasi Rengrang di Kab. Sumedang dan daerah irigasi strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemangku Daerah	Pembangunan Daerah Irigasi Strategis	persen	-	-	0,6	17,16	64,5
			8.3.2. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	8.3.2.1. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum regional	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.	Cakupan layanan air minum	persen	51,76	54-58	58-63	63-70	70-73
				8.3.2.2. Peningkatan-pengolahan sampah skala regional	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui Pembangunan pengolahan sampah kawasan metropolitan Bodebek Karpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya diantaranya pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kab. Bandung, TPPAS Regional Nambo di Kab. Bogor, TPPAS Regional di Metropolitan Cirebon Raya, optimalisasi dan persiapan pasca operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos (TPK) Sarimukti di Kab.	Cakupan layanan persampahan perkotaan	persen	63,53	63-64	64-65	65-67	67-69

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
			8.3.3. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman	8.3.3.1. Pengembangan sistem transportasi udara	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat, antara lain melalui dukungan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten Sukabumi, pengembangan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastranegara, Bandara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor, Pangkalan Udara Kalijati di Kabupaten Subang, Pangkalan Udara Cibeureum di Kabupaten Tasik, Pangkalan Udara Wiradinata di Kota Tasikmalaya, Bandara	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara	<i>persen</i>	0,3	0,05-0,06	0,06-0,17	0,17-0,25	0,25-0,36
				8.3.3.2. Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut regional, antara lain melalui pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai pintu gerbang ekspor dan perdagangan Jawa Barat Bagian Timur, pembangunan Pelabuhan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, mendorong pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Jawa Barat, serta pengembangan pelabuhan laut regional Jawa Barat bagian Selatan, serta pelabuhan strategis lainnya atas dasar kesepakatan	Tingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya	<i>persen</i>	N/A	40-45	45-56	56-67	67-78

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPD 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10		
				8.3.3.3. Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport);	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	terlaksananya pengembangan angkutan massal antara lain mewujudkan pembangunan monorel di Kawasan Metropolitan Bandung, mendorong pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, pembangunan jalur KA Tanjung Sari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten, pembangunan jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang, reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang, pembangunan KRL (kereta listrik) pada jalur Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka	Tingkat ketersediaan pasarana jalur kereta api di Jawa Barat	km	1135,442	1135,442	1135,442	1135,442	1135,442

Misi 5: "Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal"

9.	Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	9.1. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	9.1.1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasis masyarakat / komunitas, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya	9.1.1.1. Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejujuran dan kesetiakawanan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	1. Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang ditangani	orang	165	182	200	220
							2. Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani	orang	130	143	157	173
							3. Jumlah anak jalanan yang ditangani	orang	2.750	3.025	3.328	3.660
							4. Jumlah penyandang disabilitas yang ditangani	orang	1.233	1.356	1.492	1.641
							5. Jumlah gelandangan yang ditangani	orang	50	55	61	67
							6. Jumlah pengemis yang ditangani	orang	200	220	242	266
							7. Jumlah orang terlantar yang ditangani	orang	1.237	1.361	1.497	1.646
							8. Jumlah wanita tuna susila yang ditangani	orang	465	512	563	619
							9. Jumlah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) yang ditangani	orang	5	6	6	7
						Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas melalui bimbingan sosial, aksesibilitas, perawatan dan pengasuhan serta pelatihan keterampilan (vocational), untuk penciptaan lapangan dan kesempatan kerja;	1. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan (vocational)	orang	100	110	121	133

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
						Meningkatkan pelayanan dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada PMKS dengan membangun infrastruktur Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terpadu di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa Barat	1. Pembangunan Infrastruktur Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terpadu di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa Barat	unit		-	-	-	1
					Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil,	1. Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diberdayakan	orang		150	165	182	200
							2. Jumlah keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH) yang ditangani	orang		90	99	109	120
						Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat;	3. Jumlah fakir miskin (FM) yang diberdayakan	orang		3.900	4.290	4.719	5.191
							4. Jumlah warga komunitas adat yang diberdayakan	KK		120	120	120	120
						Meningkatnya kesejahteraan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) / Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejujuran, dan kesetiakawanan sosial ;	1. Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh	orang		5	5	5	5
							2. Jumlah Janda PKRI penerima bantuan kadeudeuh	orang		190	190	190	190
							3. Jumlah Keluarga Pahlawan penerima bantuan kadeudeuh	orang		6	6	6	6
							4. Jumlah Janda PKRI penerima bantuan perumahan	orang		20	20	20	20
							5. Saresehan nilai-nilai kepahlawanan dan kejujuran	orang		700	770	847	932
					Program Perlindungan Sosial	Memberikan perlindungan sosial kepada, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	1. Jumlah korban tindak kekerasan yang ditangani	orang		150	110	120	130
							2. Jumlah pekerja migran bermasalah yang ditangani	orang		222	240	260	280
							3. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindungan Sosial	orang		2.090	2.299	2.529	2.782
							4. Jumlah anak terlantar yang memperoleh perlindungan sosial	orang		24.300	26.730	29.403	32.343
							5. Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial	orang		1.070	1.177	1.295	1.424
						Memberikan bantuan dan asistensi sosial serta bantuan tunai bersyarat / Program Keluarga Harapan (PKH).	1. Jumlah penerima bantuan tunai bersyarat PKH	KK		400.000	440.000	484.000	532.400
					Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;	Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;	1. Jumlah korban bencana yang menerima bantuan darurat	orang		72.800	80.080	88.088	96.897

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
						Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial;	2. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial	%		-	100%	100%	100%
						Meningkatkan partisipasi masyarakat / relawan dalam penanggulangan bencana.	3. Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	orang		410	451	496	546
		9.1.2. Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	9.1.1.2. Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.	Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	1. Jumlah peserta bimbingan manajemen karang taruna	KT		30	33	36	40	
						2. Jumlah peserta bimbingan manajemen pekerja sosial masyarakat	PSM		30	33	36	40	
						3. Jumlah peserta bimbingan manajemen Orsos/LKS	Orsos		40	44	48	53	
						4. Jumlah forum jejaring orsos	orsos		300	330	363	399	
						5. Jumlah peserta jejaring CSR bidang Kesos	orang		130	143	157	173	
						6. Jumlah karang taruna penerima bantuan	lembaga karang taruna		30	33	36	40	
						7. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat penerima bantuan	orang		30	33	36	40	
						8. Jumlah organisasi sosial / LKS penerima bantuan	lembaga Orsos		15	17	18	20	
						9. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) penerima kadeudeuh	orang		625	625	625	625	
						10. Jumlah penerima bantuan sarana pelayanan	lembaga orsos / LKS		52	57	63	69	
						11. Jumlah penerima bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Karang Taruna	lembaga karang taruna		55	61	67	73	
						12. Jumlah penerima bantuan operasional bagi Pekerja Sosial Masyarakat	orang		36	40	44	48	
						13. Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) dalam pembinaan	desa / kelurahan		10	11	12	13	
						14. Penguatan kelembagaan dunia usaha (Social Responsibility)	lembaga / dunia usaha		60	66	73	80	
						15. Penguatan kapasitas kelembagaan PSKS	orang / lembaga		332	365	402	442	
						Meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja sosial secara profesional;	1. Jumlah pekerja sosial yang mendapat pelatihan	orang		420	462	508	559
						Meningkatkan pembinaan dalam pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial;	1. Jumlah peserta bimtek pendayagunaan sumber dana sosial	orang		139	153	168	185

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr					
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016			
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10					
						Meningkatkan jangkauan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan bimbingan sosial.	1. Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial	orang		1.210	1.331	1.464	1.611			
10.	Mewujudkan Pemuda Yang Tangguh dan berdaya saing serta Meningkatkan Prestasi Olah Raga	10.1. Meningkatkan peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu	10.1.1. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana olahraga;	10.1.1.1. pendukung pembangunan gelanggang olahraga di Kota/ Kabupaten;	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga	Mendukung pembangunan gelanggang olahraga di kota/kabupaten	Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	Venue		7	33	66	0			
								GOR		5	5	5				
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan	10.1.2.1. Peningkatan pembinaan olahragawan	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga	Meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara berkelanjutan dan olahraga masyarakat	Jumlah olahragawan berprestasi	Orang	3869	3373	3673	4078				
							Medali		23	30	70	45				
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	10.1.2.2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga	Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi dalam berolahraga	Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Orang	41401	496958	646046	839859					
						Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga	Organisasi	20	25	30	35					
						10.2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya dan pariwisata	10.2.1. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktifitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;	Meningkatnya peranserta organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Ketersediaan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan	Organisasi	60	80	90	100	
										10.2.1.2. Peningkatan Pembinaan karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;	Meningkatnya pembinaan karakter pemuda	Jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda	Orang	200	800
		Jumlah Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan yang memenuhi standar mutu	Organisasi		22	22	22									
					Kab/Kota		5	5	5							
11.	Melestarikan Seni dan Budaya berbasis Kearifan Lokal dan mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing	11.1. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya dan pariwisata	11.1.1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah	11.1.1.2. Peningkatan pelestarian budaya lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa sastra dan aksara daerah	Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah	Jenis Kegiatan (Dokumentasi, Pembinaan dan Bahan Kebijakan)	3	3	3	3				
							11.1.2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah	11.1.2.1. terwujudnya jawa barat sebagai pusat budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah	Pengelolaan Aspek Kesejarahan, Nilai Tradisi, Permuseuman dan Kepurbakalaan	Jenis kegiatan/tahun (Dokumentasi, Pembinaan, Bahan Kebijakan, Penanganan Cagar Budaya/Kelaki	4	5	5	5
											Terwujudnya Pusat Kebudayaan Jawa Barat	0	0	0,25	0,25	0,25
		11.1.3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah	11.1.3.1. Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat	Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah	Jenis kegiatan per tahun (event Seni dan Perfilman, Misi Kesenian, Bahan Kebijakan, Dokumentasi, Pewarisan, Revitalisasi Seni Tradisi, SDM Seni dan Perfilman)	0	7	7	7					
						Sarana Kesenian di Jawa Barat	0	26	6	6	6					
						perangkat/set/unit/kab-kota per tahun;										

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
							Pembangunan Plasa Kreatif	plasa/tahun	0	0	0	0	1
			11.1.4. Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya	11.1.4.1. Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di bidang budaya	Pengusulan HAKI Warisan Budaya Tak Benda	Usulan		1	1	1	1
					Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di bidang seni	Pengusulan HAKI Seni Tradisi	Usulan/Rekomendasi		2	1	1	1
			11.1.5. Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya	11.1.5.1. Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta	Pemberian Penghargaan dan pembinaan di Bidang Seni dan Perfilman	Orang/Tahun		Penghargaan: 10 Orang, Pembinaan:1 Kegiatan	Penghargaan: 10 Orang, Pembinaan:1 Kegiatan	Penghargaan: 10 Orang, Pembinaan:1 Kegiatan	
							Pembinaan di bidnag seni dan perfileman	Kali/Tahun	0	4	4	4	4
					Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya apresiasi budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta	Pembinaan di Bidang Kebudayaan	Kali/Tahun		0	3	3	3
12.	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia	12.1. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	12.1.1. Meningkatnya kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama	12.1.1.1. meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyarakat							
						Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat							
			12.1.2. Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan	12.1.3. Penguatan lembaga keagamaan	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Dukungan fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal dan informal)							
						Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan							
						Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan sumber daya bidang keagamaan							
					Program Pemeliharaan Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat								
		13.1 Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	1.4.1. Meningkatkan ketrampilan dalam berwirausaha bagi perempuan	1.4.1.1. Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan;	Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS	desa / kelurahan	104	130	157	184	211
						Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA		unit	438	464	491	518	545

No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)	Satuan	Tahun Baseline (LKPJ 2012)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Progr		
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis							2014	2015	2016
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		
			1.4.2. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1.4.2.1. terwujudnya Pemberdayaan Perempuan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	63,25	64,25	65,25	66,67	67
						Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	68,08	69,7	70	72,02	73
						Meningkatnya peranan perempuan di bidang politik	Prosentase anggota parlemen perempuan	persen		26	30	45	45
			1.4.3. Mencegah dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (trafficking)	1.4.3.1. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking);	Prosentasi kasus kekerasan terhadap perempuan	persen		75	60	50	40
							Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen		100	100	100	100
			1.4.4. Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri	1.4.4.1. Perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	terwujudnya Kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak.	Jumlah Kota Layak Anak	buah	19	23	26	27	27
				1.4.4.2. Pengokohan ketahanan keluarga	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Terwujudnya Keluarga Sejahtera	menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera	keluarga		2.526.361	2.273.608	2.020.985	1.768.362

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
100	100	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
677	683	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
121,37	121,88	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
98,67	99,7	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
90	95	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
98,67	99,7	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
88,71	94,92	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
1500	1500	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
2500	2500	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
100	100	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
4.196	4.696	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
100	100	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
100	100	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
850	906	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
975	1141	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
28	30	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
279.151	293.108	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
19.300	22.000	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
78,5	80,25	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
23040	25920	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
54	60	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
12,4	13,15	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
11,67	12,11	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
11,17	11,28	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
246	288	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
20,8	21,4	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
1	1	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
3.169	3.584	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
99.00-99.50	99.00-99.50	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
2360	2500	Pendidikan	Disdik	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
5000	6000	Perpustakaan	Bapusipda	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
8000	9600	Perpustakaan	Bapusipda	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
416.667	500.000	Perpustakaan	Bapusipda	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
90	95	Perpustakaan	Bapusipda	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
5.625.000	6.750.000	Perpustakaan	Bapusipda	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
70,82	79,56	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
87,20	89,08	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
77	80	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
65	75	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
65	70	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
0,55	0,5	Kesehatan	Dinkes	BKPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
70	80	Kesehatan	Dinkes	RSUD Alihsan	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
2,68	,2,58	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
88	87	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
96	96,50	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
45	50	Kesehatan	Dinkes	RS Jiwa	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
91	100	Kesehatan	Dinkes	RSUD Al Ihsan	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
<55	<55	Kesehatan	Dinkes	RSUD Al Ihsan	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
98	100	Kesehatan	Dinkes	RSUD Al Ihsan	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
100	100	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
< 1	< 1	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
90	92	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
87	87	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
100	100	Kesehatan	Dinkes	RSUD Allhsan; RS Jiwa; RS Paru	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√	√	
90	100	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
45	50	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
70	75	Kesehatan	Dinkes	RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
65	75	Kesehatan	Dinkes	RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
5	6	Kesehatan	Dinkes	RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
95	100	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
90	100	Kesehatan	Dinkes	RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
60	70	Kesehatan	Dinkes	RSUD Allhsan; RS Jiwa; RS Paru	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
98	100	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
5	6	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
75	80	Kesehatan	Dinkes	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
66,5	67,1	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP3AP2KB	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
51,1	51,6	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP3AP2KB	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
375	425	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP3AP2KB	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
1.358	1.385	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP3AP2KB	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
1,85	1,84	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP3AP2KB	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
20,9	21,32	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP3AP2KB	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
240	260	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP3AP2KB	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
80	100	Perumahan	Diskimrum	BPMPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
3400	3500	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
55	60	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
580	600	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
70	75	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
480	480	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
487.000	80.280	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
60	60	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
950	1000	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
10	11	Ketransmigrasian	Disnakertrans	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
10	11	Ketransmigrasian	Disnakertrans	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
980	990	Ketransmigrasian	Disnakertrans	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
30.000		Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
3,00	3,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
5,00	5,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
3,00	3,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2,00	2,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2,00	2,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2,00	2,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2,00	2,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
2,00	2,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
4,00	4,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2,00	2,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2,00	2,00	Pertanian	Distan TP	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
> 2	> 2	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
820.470	852.480	Pertanian	Disnak	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
214.007	219.030	Pertanian	Disnak	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
273.591	281.719	Pertanian	Disnak	BKPD; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
500	500	Pertanian	Distan TP	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
67,50	70,00	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
13,00	13,00	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
500	500	Pertanian	Disnak	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
1.250	1.250	Pertanian	Distan TP	Dis. PSDA	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1.250	1.250	Pertanian	Distan TP	Dis. PSDA	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
38,00	40,00	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
13,00	13,00	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
112.750	111.622	Pertanian	Distan TP	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
< 9,10	< 9,00	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
0	0	Pertanian	Disnak	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
50	45	Pertanian	Disnak	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
< 2,1%	< 2%	Pertanian	Disnak	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
0	0	Pertanian	Disnak	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
<9,1	<9,1	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
10,70	10,50	Pertanian	Distan TP	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
20 pelaku (10 Kab/Kota)	20 pelaku (10 Kab/Kota)	Pertanian	Distan TP	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
36,00	40,00	Pertanian	Distan TP	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
32,20	35,00	Pertanian	Distan TP	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
32,00	35,00	Pertanian	Distan TP	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
5	5	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
> 2,00	> 2,00	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
4	4	Pertanian	Disnak	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
5,00	5,00	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
9	10	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
31	34	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
14,52	17,42	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
7,32	8,05	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
> 2	> 2	Pertanian	Disbun	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
10,00	10,00	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1,00	1,00	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1	1	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
5	5	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2	2	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
10,00	10,00	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
27	27	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
30	30	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
10,00	10,00	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
10,00	10,00	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2	2	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
2	2	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
100,00	100,00	Kehutanan	Dishut	Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
100,00	100,00	Penanaman Modal	BPPT	BKPPMD, Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
98,00	98,00	Penanaman Modal	BPPT	BKPPMD, Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√	√	
1.000	1.200	Penanaman Modal	BKPPMD	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
24,00	25,00	Penanaman Modal	BKPPMD	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
1	1	Penanaman Modal	BKPPMD	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
1	1	Penanaman Modal	BKPPMD	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
28	30	Penanaman Modal	BKPPMD	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
25,00	30,00	Penanaman Modal	BKPPMD	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
2	2	Penanaman Modal	BKPPMD	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
121,80	138,85	Penanaman Modal	BKPPMD	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√	√	
258	266	Penanaman Modal	Bappeda	Biro Adm Perekonomian	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
676,80	879,90	Penanaman Modal	Bappeda	Biro Adm Perekonomian	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
200	200	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Disperindag; Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1.000	1.000	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
500	1.000	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Disperindag; Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
		Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
		Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
4.000	4.000	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Distan TP; Disbun; Disnak; Dishut; Diskanlut; Disperindag; Disnakertrans; Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
2.000	2.000	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
200	250	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
5.750	6.250	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
4.600	5.100	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
5	5	Koperasi dan UKM	Dnas KUMKM	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
262.500	265.425	Perindustrian	Disperindag	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
8.623	10.623	Perindustrian	Disperindag	Dis. KUMKM; Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
2.595.527	2.625.000	Perindustrian	Disperindag	Disnakertrans; Dis. KUMKM; Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
2.908	3.108	Perindustrian	Disperindag	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
87,50	90,00	Perindustrian	Disperindag	Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
400	400	Ketahanan Pangan	BKPD	Distan TP; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
100,00	100,00	Ketahanan Pangan	BKPD	Distan TP; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
84,00	83,00	Ketahanan Pangan	BKPD	Distan TP; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
90,00	90,00	Ketahanan Pangan	BKPD	Distan TP; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
13,00	-	Ketahanan Pangan	BKPD	Distan TP; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
6.950	7.200	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
20.000	20.000	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Distan TP; Disbun; Disnak; Dishut; Diskanlut; Disperindag; Dis. KUMKM; Biro Adm Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
73,00	75,00	Pekerjaan Umum	Dis. Binamarga	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
60,00	70,00	Pekerjaan Umum	Dis. PSDA	Distan TP; Biro Binprod	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
14,70	15,00	Perdagangan	Disperindag	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
29,00	30,00	Perdagangan	Disperindag	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
83,00	85,00	Perdagangan	Disperindag	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
3.177	3.177	Perdagangan	Disperindag	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
16	18	Perdagangan	Disperindag	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
39	42	Perdagangan	Disperindag	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
6.957.843	7.084.464	Perdagangan	Disperindag	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
4.176	4.452	Perdagangan	Disperindag	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
2	2	Pariwisata	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
3	3							
1	1	Pariwisata	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
5	5	Pariwisata	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
250	250							
1.300.000	1.500.000	Pariwisata	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1.025.000	1.130.000	Pariwisata	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
100,00	100,00	Penataan Ruang	Bappeda	Diskimrum	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
100,00	100,00	Penataan Ruang	Bappeda	Diskimrum	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
89,00	100,00	Perhubungan	Dishub	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		

100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Organisasi	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
50%	50%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Organisasi	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
65,15	68,05	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Organisasi	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Semua OPD		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP	√		
60	67	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pemum		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
A	A	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPPT	Dispenda	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
8 OPD/BALAI/KCP/UPTD	10 OPD/BALAI/KCP/UPTD	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Organisasi	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
90%	100%	Kearsipan	Bapusipda	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
90%	100%	Kearsipan	Bapusipda	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
90%	100%	Kearsipan	Bapusipda	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
3	3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Keuangan	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb, BKPP			
100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Keuangan	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb, BKPP			
100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bappeda	Seluruh OPD	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
100%	100%						√	
100%	100%						√	
100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Keuangan	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb, BKPP, Inspektorat			
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dispenda	Biro Pengelolaan Barang Daerah; Biro Keuangan	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP	√		
83,97%	83,65%					√		
15,90%	16,21%					√		
0,13%	0,14%					√		
90%	95%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Otda dan Kerjasama	Dinkes; Distbun; Diperindag; RS-Paru	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP	√		
55	65	Pertanahan	Biro Pemerintahan Umum	Biro PBD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
95%	100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Seluruh OPD				

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
80%	90%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKPP	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
80%	85%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Seluruh OPD				
100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Seluruh OPD	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
30%	35%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Seluruh OPD	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
90%	100%	Statistik	Bappeda	Seluruh OPD	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
85%	85%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pengelolaan Barang Daerah	Biro Keuangan	Bappeda; Biro Adm.Pembangunan, BKPP			√
71%	73%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pengelolaan Barang Daerah	Biro Keuangan	Bappeda; Biro Adm.Pembangunan, BKPP		√	
95%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pengelolaan Barang Daerah	Biro Keuangan	Bappeda; Biro Adm.Pembangunan, BKPP	√		
56	56	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
95%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
88%	94%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pemerintahan Umum	BP3AP2KB	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Semua OPD					√
100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Semua OPD					
AD = 12, AP =10 dan LN =6	AD = 12, AP =10 dan LN =7	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Otonomi Daerah	Bappeda	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP	√		
PT=6, BUMD/BUMN=3, Swasta=5 dan LSM=6	PT=7, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan LSM=3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Otonomi Daerah	Bappeda	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP	√		
80%	80%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPD	Biro Pemum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
60%	65%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPD	Biro Pemum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
60%	65%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPD	Biro Pemum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
70%	75%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPD	Biro Pemum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
45.000	50.000	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPD	Dinkes	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
70%	75%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPD	Diskimrum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
100%	100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
100	100	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Bappeda, KPID, Biro HPU	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
2,70%	2,75%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	KPID, Biro HPU	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
16.690.740	18.359.814	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	KPID, Biro HPU	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
140.000 pengunjung	150.000 pengunjung	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	KPID, Biro HPU	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
105 koneksi	110 koneksi	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	KPID, Biro HPU	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
81,58%	86,24%	Komunikasi dan Informatika	KPID	Biro HPU	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
7,64% Pelanggaran isi siaran	6,85 % Pelanggaran isi siaran	Komunikasi dan Informatika	KPID	Biro HPU	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
300 Orang	300 Orang	Komunikasi dan Informatika	KPID	Biro HPU	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
14.400 Orang	28.800 Orang	Komunikasi dan Informatika	KPID	Biro HPU	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
90%	95%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD	Bandiklatda	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
45%	50%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bandiklatda	BKD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
65%	75%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD	Set. KORPRI	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
89	104	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum dan HAM	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP	√		
505	505	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum dan HAM	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP		√	
181	220	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum dan HAM	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP		√	
34	35	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum dan HAM dan HAM	Seluruh OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP	√		
16	18	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Biro Pemum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
913	867	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Bakesbangpol	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
64	61	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Bakesbangpol	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
495.452	503.792	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Biro Pemum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
4.955	5.034	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Biro Pemum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
252	277	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Biro Pemum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
2	2	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
56%	58%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
95%	97%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
19	21	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD	Biro Hukum dan HAM	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
11	13	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD	Biro Hukum dan HAM	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
160	165	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			
75%	80%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
100	100	Penataan Ruang	Bappeda	Diskimrum	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	√
91	100	Penataan Ruang	Diskimrum	Biro Hukum	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
17,7	20	Penataan Ruang	Bappeda	Diskimrum; Dishut	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
11,7-12,3	12,3-13	Lingkungan Hidup	BLHD	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
6-7	6-7	Lingkungan Hidup	BLHD	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
41-43	43-45	Kehutanan	Dishut	Bappeda	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
69	100	Kehutanan	Dishut	Bappeda	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
80	100	Kehutanan	Dishut	Bappeda	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
30	36	Kehutanan	Dishut	Bappeda	Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
6 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel, Angin, Gelombang Laut)	6 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel, Angin, Gelombang Laut)	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dis. ESDM	BPLHD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
60	70	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dis. ESDM	BPLHD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
45	50	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dis. ESDM	BPLHD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
100	100	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
9	10	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
4	4	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
170	200							
100	100	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD	Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
98,0-98,5	98,5-99,0	Pekerjaan Umum	Dis. Binamarga	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
68-69	69-70	Pekerjaan Umum	Dis. Binamarga	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
99 - 100	99 - 100	Pekerjaan Umum	Dis. Binamarga	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
230 situ/waduk 120 mata air 253 titik sungai	260 situ/waduk 150 mata air 300 titik sungai	Pekerjaan Umum	Dis. PSDA	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
81-86	86-90	Pekerjaan Umum	Dis. PSDA	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
100	100	Pekerjaan Umum	Dis. PSDA	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
73-74	74-76	Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
67-68	68-69	Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
69-70	70-71	Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√	√	
3,75-3,73	3,73-3,71	Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√	√	
88-85%	85-80%	Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	√
33-35%	35-37%	Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
93,89-94,49	94,49-95,09	Perumahan	Diskimrum	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√	√	
		Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
80	100	Perumahan	Diskimrum	BPMPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
100	100	Perhubungan	Dishub	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
100	100	Perhubungan	Dishub	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
110.575	93.989	Perhubungan	Dishub	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
77,5-87,5	87,5-100	Perhubungan	Dishub	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		√
79-81	81-83	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dis. ESDM	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
0,99126	0,99248	Pekerjaan Umum	Dis. Binamarga	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
3	3	Pekerjaan Umum	Dis. PSDA	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
100	-	Pekerjaan Umum	Dis. PSDA	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
73-74	74-76	Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
69-70	70-71	Pekerjaan Umum	Diskimrum	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11		12			13	
0,36-0,42	0,42-0,51	Perhubungan	Dishub	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
78-89	89-100	Perhubungan	Dishub	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
1135,442	1135,442	Perhubungan	Dishub	Biro. Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
242	266	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
190	209	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
4.026	4.429	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1.805	1.986	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
73	81	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
293	322	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1.811	1.992	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
681	749	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
7	8	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
146	161	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
2	1	Sosial	Dinsos	Diskimrum, Dinkes, BKPP, Biro Hukum, Biro Otdakes, Biro Bangsos,	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
220	242	Sosial	Dinsos	Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
132	145	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
5.710	6.281	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
120	120	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
5	5	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
190	190	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
6	6	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
20	20	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1.025	1.127	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
140	145	Sosial	Dinsos	BP3APKKB, Dinkes, RSJ, Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
300	320	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disnakertrans, BP3TKI, RSJ, Biro	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
3.060	3.366	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
35.578	39.135	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1.567	1.723	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
585.640	644.204	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
106.586	117.245	Sosial	Dinsos	BPBD	Biro Bangsos	√		

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
100%	100%	Sosial	Dinsos	BPBD	Biro Bangsos	√		
600	660	Sosial	Dinsos	BPBD	Biro Bangsos	√		
44	48	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
44	48	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
59	64	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
439	483	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
190	209	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
44	48	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
44	48	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
22	24	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
625	625	Sosial	Dinsos	Disnakertrans, Dinkes, Disdik, BPMPD, Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
76	84	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
81	89	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
53	58	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
15	16	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
88	97	Sosial	Dinsos	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
486	535	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
615	676	Sosial	Dinsos	Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
204	224	Sosial	Dinsos	BPPT	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
1.772	1.949	Sosial	Dinsos	Diskominfo, Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
0	0	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
6	6	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	√
4156	4283	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
80	50	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
44	44	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1091817	1419362	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
40	44	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
110	110	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1400	1600	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
22	22	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
5	5	Pemuda dan Olah Raga	Disorda	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
3	3	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
5	5	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan		√	
0,25	1	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
7	7	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
6	3	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
1	2	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
1	1	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
1	1	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
Penghargaan: 10 Orang, Pembinaan:1 Kegiatan	Penghargaan: 10 Orang, Pembinaan:1 Kegiatan	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan	√		
4	4	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
3	3	Kebudayaan	Disparbud	Biro Adm. Perekonomian	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			√
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan	Biro Yansos		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	Biro Yansos		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Yansos		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Yansos		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Yansos		Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
238	265	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	Semua OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
572	599	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			

am		Bidang Urusan	Pelaksana			Keterangan (V)		
2017	2018		OPD UTAMA	OPD MITRA UTAMA	OPD PENDUKUNG	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Benefit
		11	12			13		
67,5	68	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	Semua OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
73,5	75	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	Semua OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
50		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
30	15	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	Biro Bangsos	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	Disdik,Dinsos,Dinkes	Bappeda; Disdik; Diskominfo; Dinkes; Dinsos; Biro Bangsos; Biro Hukum dan HAM; Dishub; BPMPD			
27	27	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	Semua OPD	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			
1.515.739	1.263.116	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3AP2KB	BKKBN	Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan			